



**PENGEMBANGAN KAPASITAS KAUM PEREMPUAN MELALUI COACHING
FEMALEPRENEUR DI KABUPATEN TRENGGALEK**

Oleh

Habib Solehudin¹, Andriyanto², Zainiyah Alfirdaus³

^{1,2}Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

³Entrepreneurship Departement Binus Bussines School Undergraduate Program. Bina
Nusantara Univercity Jakarta 11480

E-mail: ¹habibsolehudin02@gmail.com, ²andry_anto2005@yahoo.com,
³zainiyah.alfirdaus@binus.ac.id

Abstract

This study purpose to determine the Capacity building of female community through coaching female on Trenggalek city. This research is including qualitative research under the case study approach. The data collection was done by doing the interview, observation, and documentation. The data analysis test used triangulation method by rechecking the credibility level of information. Entrepreneur to be implemented through female preneur program in order to capacity building with intensif choaching provide assistance that to designed in particular to give theoritis knowledge or practical in order are able to create superior human resources that able to independently and becomes female entrepreneur quality.

Keywords: Capacity Building, Femalepreneur, Coaching

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat, khususnya di negara negara berkembang. Indonesia termasuk kategori negara berkembang. Pada umumnya negara yang sedang berkembang memiliki ciri ciri yang hampir sama, yakni bergantung pada hasil alam seperti pertanian dan pertambangan. Padahal potensi dan sumber daya alam di Indonesia apabila dimanfaatkan secara maksimal akan membawa peningkatan pertumbuhan dan kemajuan kemakmuran rakyat.

Untuk mengolah sumber daya alam ini memerlukan suatu keahlian, ketrampilan dan pengetahuan yang cukup. Hal ini akan tercapai melalui usaha yang lebih keras dan sungguh sungguh baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Untuk mencapai ke arah yang lebih baik bagi bangsa dan negara diperlukan suatu usaha pembangunan dalam segala aspek kehidupan. Pembangunan adalah rangkaian usaha

pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Soundang P. Siagian, 1985 : 2). Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa Bangsa Indonesia juga telah melakukan perencanaan secara sadar dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus menerus dalam rangka memperbaiki konsisi sosial maupun ekonomi dari waktu ke waktu.

Kebijaksanaan pembangunan di Indonesia dilaksanakan dengan pola umum pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu prioritas pembangunan jangka panjang diletakkan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan Ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi mempunyai arti



.....
sebagai suatu usaha menambah peralatan modal dan menambah skill agar satu sama lainnya membawa pendapatan perkapita yang lebih tinggi (Sumitro Djodjohadikusumo, 1955 : 39).

Pembangunan yang dilakukan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terstruktur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana termuat dalam pasal 264 ayat 1 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan, sebagai suatu kesatuan sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi perencanaan Pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah di kenal 3

(tiga) pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah , yaitu :

- 1) Pendekatan Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
- 2) Pendekatan Politis, memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan program , karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD.
- 3) Pendekatan Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan atas – bawah (*Top Down*), dan bawah atas (*Bottom-Up*) sesuai jenjang dalam pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan

Ada beberapa pendekatan lain yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan, antara lain, melalui pendekatan holistik tematik dalam perencanaan pembangunan daerah, yakni dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

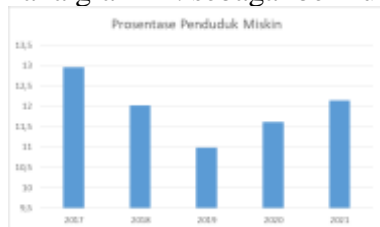
Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan Pendekatan Spacial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan



dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan. Pembangunan ekonomi selain membawa peningkatan modal yang makin baik dan dapat menambah keahlian, juga berpengaruh bagi peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan rakyat.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu ujung tombak dalam rangka tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kesenjangan gender yang masih banyak dirasakan tidak hanya di kota tetapi juga yang ada di desa desa, utamanya dalam mendapatkan suatu pekerjaan. Sebagian gender masih menjadi halangan bagi sebagian wanita untuk memulai sebuah usaha mencari lapangan pekerjaan. Karena wanita masih diragukan kemampuannya untuk memiliki usaha sendiri. Padahal wanita dengan bisa bekerja sendiri atau memiliki usaha mandiri akan banyak membantu perekonomian dalam keluarga. Guna menghindari kesenjangan sosial, maka diperlukan pemerataan dalam strategi pembangunan Nasional. Pemerintah berusaha menghindarkan terjadinya pemusatan pembangunan pada suatu daerah atau wilayah tertentu. Pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara merata baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan untuk mencegah terjadinya ketimpangan pembangunan yang sangat tinggi.

Pembangunan gender pada sektor ekonomi menjadi faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Keadaan data Garis Kemiskinan, jumlah dan Prosentase penduduk miskin Kabupaten Trenggalek tahun 2017 – 2021 sebagai mana grafik 1. sebagai berikut :



Gambar 1. Grafik Angka Kemiskinan, (Badan Pusat Statistik Trenggalek, 2021)

Berdasarkan data di atas, dengan program dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, maka angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami penurunan cukup signifikan dengan menyentuh angka 10, 98%. Tetapi oleh karena situasi pandemi di tahun 2020 angka kemiskinan kembali naik 11, 62 %. Dan masih dalam situasi pandemi di tahun 2021 angka kemiskinan kembali naik 12,14 %. (Data BPS : 2021)

Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong pembangunan di bidang perekonomian, dengan melibatkan perempuan dalam berbagai macam proses pembangunan. Mulai tahap perencanaan mereka harus terlibat dalam musyawarah dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Khusus kaum Perempuan diwadhahi dalam inovasi **Musrenakeren**, yakni Musyawarah perempuan, anak dan Kelompok rentan, yang dilaksanakan dari tingkat desa sampai dengan Kabupaten. Sedangkan untuk mempertajam penyampaian aspirasi diwadhahi dengan inovasi **Super keren**, yakni Suara Perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan.

Di sisi lain dalam rangka peningkatan kapasitas bagi perempuan, maka Pemkab Trenggalek membuat inovasi pemberdayaan perempuan dengan nama **Sepeda Keren**, yakni Sekolah Perempuan Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan. Selanjutnya guna melengkapi tuntutan sesuai kebutuhan pada saat ini Pemkab Trenggalek berupaya untuk melibatkan perempuan melalui program pelatihan Female Preneur, guna akselerasi kewirausahaan. Langkah ini perlu diambil karena Kaum perempuan sebagai pilar ekonomi sebuah keluarga, jika mereka berdaya diyakini akan mampu memperbaiki ekonomi keluarga. Sehingga perlu di dorong untuk dapat memaksimalkan segala potensinya melalui kegiatan berwira usaha.

Bila berbicara mengenai kewirausahaan



yang pertama terlintas dalam benak sebagian orang adalah usaha mandiri tanpa bergantung pada pihak lain. Lalu seorang usahawan atau entrepreneur diidentikkan dengan seorang bisnisan yang sukses dan memiliki jiwa ulet dan rasa percaya diri tinggi dalam menjalankan usahanya.

Kewirausahaan merupakan satu istilah yang sangat penting akhir-akhir ini. Banyak pihak yang menyadari peran pentingnya entrepreneur di dunia kerja. Bahkan mata kuliah kewirausahaan pada saat kuliah, yang dulu dirasakan hanya sebagai “pelengkap” di dalam perkuliahan. Karena hanya mempelajari teori tanpa ada praktek nyata bagaimana caranya untuk memahami kewirausahaan itu. Baru di era sekarang dengan banyaknya pengusaha sukses, sebagai salah satu pengungkit dalam rangka pengentasan kemiskinan sehingga Pemerintah Daerah memiliki ambisi mengenalkan kepada masyarakat luas untuk mempelajari jiwa bisnis ini. Yang selanjutnya istilah entrepreneurship atau kewirausahaan sekarang menjadi lebih dikenal. Seorang entrepreneur bukanlah seorang “pengusaha biasa”.

Demikian pentingnya pemberdayaan kewirausahaan ini, sebagai pengungkit upaya penurunan angka kemiskinan, sehingga Pemkab Trenggalek bekerjasama dengan Tim Femalepreneur Indonesia untuk melakukan kegiatan pelatihan khususnya bagi kaum perempuan di Kabupaten Trenggalek dengan sebutan pengembangan kapasitas, “Pelatihan Female Preneur”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil tema mini paper tentang “*Peningkatan Kapasitas Kaum perempuan melalui Coaching female preneur guna membuka aksesibilitas “ di Kabupaten Trenggalek*”

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas. Maka beberapa permasalahan yang diangkat dalam mini paper ini adalah :

1. Bagaimana Model peningkatan Kapasitas Kaum perempuan guna membuka aksesibilitas di Kabupaten Trenggalek
2. Bagaimana pengaruh pemberdayaan Female preneur terhadap aksesibilitas di Kabupaten Trenggalek

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Mini paper Evaluasi pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dengan Topik *COACHING Female Preneur* ini adalah untuk :

- 1) Mengevaluasi kegiatan pelatihan Coaching female preneur yang dilakukan Pemkab Trenggalek, guna melakukan penyempurnaan pada kegiatan yang sama di masa mendatang.
- 2) Memberi petunjuk dalam pelaksanaan *Training of Trainer* bagi coaching program pemberdayaan perempuan Female Preneur sesuai kebutuhan.
- 3) Sebagai acuan perbaikan terhadap panduan teknis serta pertanggungjawaban capaian program pemberdayaan Female Preneur
- 4) Sebagai masukan pedoman perekrutan peserta yang menjadi penerima manfaat dari program female preneur di masa mendatang.
- 5) Agar tercipta tertib administrasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan *female preneur*.

TINJAUAN TEORI

Pengertian Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas

Dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, istilah pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau bertindak, mendayagunakan berarti mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil. Pemberdayaan secara umum diartikan lebih berdaya dari sebelumnya baik dalam hal wewenang, tanggung jawab, maupun kemampuan individual yang dimiliki (Anggati M Sinaga, Sri Hadiati : 2001).



Pemberdayaan juga proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya, sehingga masyarakat mampu mandiri (Ambar Teguh : 2017). Sedangkan dalam jurnal ini pemberdayaan yang dimaksud adalah usaha atau cara dari seseorang atau kelompok dalam hal ini adalah pemerintah untuk memberikan kekuatan berupa materil maupun non materil kepada seseorang atau kelompok yang lemah di dalam masyarakat agar mereka bisa meningkatkan kemampuan yang ada pada dirinya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.

Sedangkan pengertian Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*), dikemukakan oleh (Morrison, 2001) melihat *capacity building* sebagai suatu proses atau serangkaian aktivitas dalam melakukan perubahan multi-level didalam individu, kelompok organisasi dan sistem dalam rangka memperkuat penyesuaian individu dan organisasi sehingga tanggap terhadap perubahan lingkungan. Definisi lain yang senada dikemukakan oleh (Brown et al., 2004) yang melihat *capacity building* sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, kelompok, suatu organisasi atau sistem dalam upaya mencapai tujuan atau menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Grindle dalam Haryono, dkk (2012) mengemukakan "*Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance.*" Bahwa Pembangunan kapasitas upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai

macam strategi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintah.

Selanjutnya *Capacity Building*, menurut Soeprapto (2006 : 11) sebagai berikut ;

- a. Pengembangan kapasitas bukanlah produk, melainkan sebuah proses.
- b. Pengembangan kapasitas adalah proses pembelajaran multitingkatan meliputi individu, grup, organisasi dan sistem.
- c. Pengembangan kapasitas menghubungkan ide terhadap sikap.
- d. Pengembangan kapasitas dapat disebut sebagai *actionable learning* dimana pengembangan kapasitas meliputi sejumlah proses-proses pembelajaran yang saling berkaitan, akumulasi benturan yang menambah prospek untuk individu dan organisasi agar secara terus menerus beradaptasi atas perubahan.

Milen (2006:12) mendefinikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus. Sedangkan menurut Morgan dalam Milen (2006:14) merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menerangkan bahwa pengembangan kapasitas ialah "*process whereby people, organizations and society as a whole unlearn, strengthen, create, adapt and maintain capacity over time.*" Maknanya ialah pengembangan kapasitas sebagai sebuah proses keberlanjutan kapasitas secara terus menerus. Pendapat ini lebih menekankan orientasi kapasitas sebagai penguatan berbagai kemampuan dalam berbuat.



Pada umumnya, garis besar dalam konsep pengembangan kapasitas selalu berada pada wilayah individu, kelompok organisasi dan sistem. Proses yang terus menerus dalam pola pengembangannya, menjadi tanda bahwa pengembangan kapasitas bersifat dinamis yang selalu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya.

Lebih lanjut World Bank menekankan perhatian *capacity building* pada;

- a) Pengembangan sumber daya manusia; training, recruitment dan pemutusan pegawai professional, manajerial dan teknis,
- b) Keorganisasian; pengaturan struktur, proses, sumberdaya dan gaya manajemen,
- c) Jaringan kerja; berupa koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi network, serta interaksi formal dan informal,
- d) Lingkungan organisasi; berupa aturan dan undang-undang yang mengatur pelayanan public, tanggungjawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menjadi hambatan bagi development tasks, serta dukungan keuangan dan anggaran,
- e) Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya meliputi faktor-faktor politik, ekonomi dan situasi kondisi yang mempengaruhi kinerja.

Sedangkan UNDP (*United Nations Development Programme*)

memfokuskan pada tiga dimensi yaitu ;

- 1) Tenaga kerja (dimensi *human resources*), yaitu kualitas Sumberdaya manusia serta cara pemanfaatannya.
- 2) Modal (dimensi fisik), menyangkut sarana material, peralatan, bahan- bahan yang diperlukan dan ruang/gedung,
- 3) Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, penentuan kebijakan, pengendalian dan evaluasi, komunikasi, serta sistem informasi manajemen. Edarlin (dalam Soeprapto, 2006).

Selanjutnya, UNDP dan *Canadian International Development Agency* (CIDA) dalam Milen (2006:15) memberikan pengertian peningkatan kapasitas sebagai proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk;

- a. menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (core functions), memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan;
- b. memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan

Berdasarkan pemaparan mengenai definisi *capacity building* diatas, dapat menarik kesimpulan bahwa *capacity building* secara umum merupakan suatu proses pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi serta sistem untuk memperkuat kemampuan diri, kelompok dan organisasi sehingga mampu mempertahankan diri/profesinya di tengah perubahan yang terjadi secara terus menerus.

Tujuan Pengembangan Kapasitas (Capacity Building)

(Morrison, 2001) menjelaskan bahwa tujuan *capacity building* adalah pembelajaran yang berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi menghadapi perubahan yang terjadi setiap waktu. Dari tujuan tersebut strategi *capacity building* memberikan gambaran untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kemampuan kolektif organisasi yang mengharapkan kinerja lebih baik.

Lebih lanjut, Daniel Rickett dalam (Ratnasari, 2013) mengatakan “the ultimate goal of capacity building is to enable the



organization to grow stronger in achieving its purpose and mission". Lebih jauh merumuskan bahwa tujuan dari pengembangan kapasitas adalah;

1. Mengakselerasikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemantauan secara proporsional, tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggungjawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah.
3. Mobilisasi sumber-sumber dana pemerintah, daerah dan lainnya.
4. Penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisien.

Dimensi dan Tingkatan Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) ;

Penjelasan mengenai tingkatan dalam pengembangan kapasitas dikemukakan oleh (Soeprapto, 2006) yang menyatakan bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan :

1. Tingkatan Individu, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang didalam organisasi;
2. Tingkatan organisasi, seperti struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, standar operasional prosedur pekerjaan, sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan organisasi;
3. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakn tertentu.

Lebih lanjut, sebagai pakar dibidang pengembangan kapasitas, Merilee S. Grindle (Alam & Prawitno, 2015) mengemukakan bahwa pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan yaitu:

1. Dimensi pengembangan SDM

(Development of the human resources), dengan fokus: personel yang profesional dan kemampuanteknis serta tipe kegiatan seperti: pelatihan (training), praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan recruitment.

2. Dimensi penguatan organisasi (Strengthening organization), dengan fokus: tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem intensif, perlengkapan personal, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial.
3. Reformasi kelembagaan (Reformation of institutions), dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta makro struktur dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi birokrasi.

Dalam pengembangan sumber daya manusia, maka konteks yang tepat adalah diberikan kepada penyediaan personel yang profesional dengan melakukan kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan (*training*).

Capacity Building (Pengembangan kapasitas) menurut Gandara, (2008:16). dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Merupakan sebuah proses yang berkelanjutan.
- b. Memiliki esesensi sebagai sebuah proses internal.
- c. Dibangun dari potensi yang telah ada.
- d. Memiliki nilai intrinsik tersendiri.
- e. Mengurus masalah perubahan.
- f. Menggunakan pendekatan terintegrasi dan holistik.

Indikator-indikator di atas dapat dimaknai bahwa pengembangan kapasitas merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan secara keberlanjutan untuk tetap dapat bertahan terhadap perubahan lingkungan yang terjadi secara terus menerus.

Pengertian Enterreneur

Istilah entrepreneur dapat didefinisikan sebagai orang yang menciptakan pekerjaan



yang berguna bagi diri sendiri. Entrepreneur berasal dari kata *entrependerere* (bahasa Perancis) yang artinya sebuah usaha yang berani dan penuh resiko. Istilah ini diawali oleh Richard Cantillon (1755) yang berpendapat “*Entrepreneurial is an innovator and individual developing something anique and new*”. Istilah ini dipopulerkan oleh Ekonom Jean Baptise Say untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu mengelola sumber daya yang dipunyai secara ekonomis (efektif dan efisien) dari tingkat produktifitas yang rendah menjadi lebih tinggi. Pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya adalah melakukan inovasi atau kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi (Hendro : 2011).

Selanjutnya Richard T. Elly dan Ralph H. Hess, menyatakan bahwa secara singkat

seorang entrepreneur mengorganisasi dan mengoperasikan sebuah perusahaan untuk mencapai keuntungan (J.Winardi :2003). Dapat dikatakan bahwa seorang entrepreneur sebagai orang yang mampu mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah serta dapat mencari peluang dari orang lain.

Menurut Schumpeter, seorang entrepreneur tidak selalu seorang pedagang (businessman) atau seorang manager; ia adalah orang yang unik yang dan seorang pengambil resiko (risk taker) serta memperkenalkan produk-produk inovatif dan tehnologi baru ke dalam perekonomian. Mindset atau pola pikir masyarakat Indonesia tentang wirausaha masih belum banyak berubah. Seorang pengusaha (entrepreneurship) dianggap lebih beresiko daripada menjadi pegawai yang memiliki pendapatan teratur tiap bulannya. Sehingga tingkat kewirausahaan di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Ciputra mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan sudah saatnya mengubah mindset masyarakat untuk memiliki mental mandiri dan berjiwa wirausaha. Harapannya, bila menjadi pengusaha, maka seseorang akan mampu menciptakan lapangan usaha bagi orang lain.

Pengusaha Perempuan (womanpreneur)

Womenpreneur merupakan sebutan bagi wanita yang menjalankan sebuah usaha atau wanita pengusaha yang mana didefinisikan sebagai wanita atau sekelompok wanita yang memulai, mengatur, dan mengoperasikan perusahaan bisnis. Perusahaan bisnis yang dimaksud bukan hanya sebuah perusahaan bisnis yang formal melainkan juga perusahaan bisnis informal. Terdapat tiga kategori pengusaha wanita yaitu “Change”, “Forced”, dan “Created” pengusaha. Klasifikasi yang berbeda ini didasarkan pada bagaimana bisnis mereka dimulai atau tentang apa alasan utama atau motivasi mereka dalam memulai bisnis mereka, sebagai berikut ;

- a. *Change Entrepreneur*, adalah mereka yang memulai bisnis tanpa tujuan atau rencana yang jelas. Biasanya, bisnis ini berawal dari hobi mereka yang berevolusi ke perusahaan ekonomi dari waktu ke waktu.
- b. *Forced Entrepreneur*, adalah mereka yang dipaksa oleh keadaan yang menuntut dirinya untuk melakukan kegiatan bisnis. Motivasi dari mereka cenderung bersifat finansial.
- c. *Created Entrepreneur*, adalah mereka yang melakukan kegiatan bisnis karena termotivasi, didorong, dan dikembangkan melalui hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan seperti program pengembangan kewiraswastaan.

Proses kewirausahaan antara laki-laki dan wanita tidak jauh berbeda, namun dalam praktiknya wanita lebih banyak mengalami kendala yang dikarenakan beberapa faktor seperti:

- (1) Hukum, adat, tradisi, budaya, dan agama.
- (2) Status perkawinan.
- (3) Pekerjaan rumah tangga yang berat.
- (4) Keterbatasan pendidikan, pengetahuan, dan informasi.
- (5) Keterbatasan dana sebagai modal dan akses kredit.
- (6) Jaringan kelembagaan yang kurang memadai. Kendala-kendala inilah yang menjadi dasar bagi wanita dalam pemilihan bidang usaha. Wanita cenderung menggeluti usaha yang tidak membutuhkan ketrampilan tinggi



dan modal besar, menggunakan teknik sederhana dan mudah dikelola sehingga pada akhirnya mayoritas mereka akan bergelut pada usaha bisnis makanan dan minuman, industri tembakau, tekstil, garmen dan kulit, kerajinan dan produk mineral non logam (Lita Rohma Dewi, 2018:).

Kesenjangan gender dalam dunia wirausaha dirasakan tidak saja di Indonesia, namun juga di negara maju seperti tertulis dalam makalah Thébaud, Sarah (2010). Menurut hasil penelitian tersebut, dikatakan bahwa gender masih menjadi halangan bagi sebagian wanita untuk memulai sebuah usaha karena wanita masih diragukan kemampuannya untuk memiliki usaha sendiri. Di Indonesia sepertinya tidak jauh berbeda, karena isu gender masih tetap menjadi satu permasalahan sendiri. Perempuan telah memulai usaha mandiri atau bisnisnya dalam usaha membantu perekonomian keluarga. Disaat mereka mampu menjual dan mendapatkan keuntungan, sebenarnya telah dimulai satu langkah menjadi seorang pengusaha perempuan. Walaupun kegiatan menjual atau berdagang yang dilakukan secara mandiri masih sulit dilakukan perempuan karena ada persepsi bahwa perempuan hanya sebagai pengurus rumah tangga saja. Tentunya dibutuhkan keuletan dan kesabaran bagi perempuan untuk membuktikan bahwa hal tersebut tidak benar.

Perempuan saat ini tidak lagi hanya sebagai penonton di dunia bisnis, namun turut berperan memajukan perekonomian negara. Perempuan dengan peran gandanya selain menjadi ibu rumah tangga juga mampu menjadi penggerak perekonomian rumah tangga. Perempuan pengusaha terbukti mampu bersaing dengan kolega prianya mengembangkan diri perusahaannya. Banyak pengusaha perempuan tangguh yang mampu berbicara dalam pentas global. Pengusaha perempuan tidak saja berada pada usaha skala besar, namun banyak pula yang berkecimpung pada usaha kecil dan menengah. Kaum perempuan dengan semangat kemandiriannya

memerlukan dukungan dari keluarga dan lingkungannya. Dengan kreatifitas dan inovasi para pengusaha perempuan dapat menjadi pengusaha yang tidak kalah dalam persaingan bisnis.

Bagaimana pentingnya peranan kaum perempuan dalam menerjuni kewirausahaan dan bagaimana agar wanita menjadi pengusaha perempuan mandiri. Bentuk inovasi apa saja yang telah dilakukan pengusaha perempuan, agar survive, bahkan menjadi pengusaha hebat yang tidak kalah dengan pengusaha pria. Banyak pengusaha perempuan yang awalnya hanya membantu kepala keluarga atau suami tetapi dapat ikut berperan dalam menopang usaha keluarga. Bersamaan dengan pertumbuhan internet dan kewirausahaan, ada dorongan yang semakin kuat bagi perempuan untuk mendobrak dominasi pria di industri dan membuka kesempatan bagi perempuan untuk mendapat kesempatan membuka usaha sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan study kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Untuk memahami kebenaran penelitian ini maka dilakukan penggalan informasi dan data empiris di lapangan secara menyeluruh di kaitkan dengan tema dan nilai pemberdayaan ekonomi kaum perempuan melalui female preneur.

1. Pelaksanaan program Female Preneur

Dalam rangka menumbuhkan ekosistem dan iklim kewirausahaan yang dapat mencetak UMKM champion (UMKM naik kelas) serta mengembangkan ide bisnis dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Trenggalek, khususnya wirausaha perempuan, maka perlu dilaksanakan Program Pelatihan Female Preneur terhadap minimal 5.000 kaum perempuan pada setiap tahunnya.

Program female preneur merupakan seluruh rangkaian kegiatan meliputi Training, Mentoring, Coaching, dan akses permodalan. Hal ini sesuai dengan visi misi Pemkab Trenggalek, yakni UMKM naik kelas, dengan



menyasar 5.000 perempuan yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Maka setidaknya sejumlah 417 peserta per bulan dari kaum perempuan di Kabupaten Trenggalek mengikuti program kegiatan ini. Dengan durasi selama 12 bulan (satu tahun anggaran).

Kegiatan female preneur ini difasilitasi oleh Tim Femalepreneur Indonesia yang akan menjadi Fasilitator, yang berlangsung sebanyak minimal 24 kali dalam satu tahun, dimana setiap bulan harus dilaksanakan sebanyak 2 kali kegiatan /pelatihan, dengan jumlah peserta setiap angkatan kurang lebih 200 orang peserta.

Mengingat masih suasana pandemi, walaupun saat ini wabah Covid 19 sudah membaik, namun untuk menjaga protokol kesehatan dan ekektifitas penyelenggaraan kegiatan, maka kegiatan ini dilaksanakan dengan cara hybrid, yakni mengkombinasikan antara daring dan luring.

Untuk kegiatan pelatihan female preneur (kewirausahaan kaum perempuan) ini dilaksanakan dengan tatap muka selama 3 (tiga) hari berturut turut, sedangkan untuk pendampingan akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan dengan cara tatap muka maupun online, melalui group Whatsaapp.

Kurikulum/ pedoman pembelajaran yang akan disampaikan diantaranya sebagai berikut ;

- a. Mindset berwirausaha
- b. Analisis dan perencanaan usaha
- c. Design produk, design branding, dan kemasan serta Marketing
- d. Perencanaan pengelolaan keuangan
- e. Pengelolaan dan peningkatan SDM
- f. Managemen hubungan pelanggan, marketplace, konten Media sosial

Sedangkan anggaran untuk menunjang kegiatan ini berasal dari beberapa OPD terkait yang ada di Pemkab Trenggalek.

2. Waktu dan tempat pelaksanaan

Program female preneur ini rencananya akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dengan rincian

sebagai berikut ;

- 1) Waktu pelaksanaan: Bulan Januari – Desember 2022, dimana pada setiap bulan dilaksanakan 2 kali kegiatan, di dalam setiap kegiatan dilaksanakan selama 3 hari pelaksanaan pelatihan, mulai pukul 08.00 s/d 16.00 wib.
- 2) Target penerima manfaat program : 5.000 Kaum perempuan
- 3) Jumlah kegiatan: 24 kali pertemuan pelaksanaan
- 4) Lokasi Pelaksanaan : Pendopo dan Gedung Bhawarasa Kabupaten Trenggalek.
- 5) Tahapan Program :
 - a. Perekrutan Relawan
 - b. Training Of Trainer (TOT)
 - c. Perekrutan peserta Pelatihan Female Preneur
 - d. Pelaksanaan Pelatihan
 - e. Mentoring intensif
 - f. Monitoring dan evaluasi
 - g. Laporan dan Pertanggung jawaban
- 6) Tahapan kegiatan, persyaratan dan keluaran :
 - a. Peserta mengikuti pelatihan female preneur selama 3 (tiga) hari
 - b. Usia peserta 20 tahun s/d 35 tahun , minimal memiliki akun marketplace dan Facebook/instagram
 - c. Harapannya peserta dapat kreatif menciptakan / membuat produk, mampu menciptakan merk/ branding dan berpromosi melalui marketplace maupun media sosial.
 - d. Usia relawan 20 s/d 45 tahun yang mampu mendampingi dan mengkoordinasikan kegiatan lapangan.
 - e. Relawan Mampu bekerjasama, memiliki ketrampilan komunikasi yang baik dan mampu mengoperasikan komputer/ melek digital.

PEMBAHASAN DISKUSI

Seorang entrepreneur sejati pasti tidak



akan langsung memperoleh hasil yang maksimal dalam waktu sebentar. Dibutuhkan proses panjang bila seseorang merasa gagal berusaha. Karena banyak hambatan yang harus dihadapi oleh entrepreneur sejati. Terutama bagi pengusaha perempuan yang notabene masih dianggap “kecil” perannya dalam dunia usaha.

Berikut ini beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh pengusaha perempuan, diantaranya yaitu:

1. Akses permodalan, masalah yang sering dihadapi para perempuan dalam memulai usaha adalah sulit mendapat modal, karena kaum perempuan cenderung memilih sektor jasa seperti warung makan dan penginapan. Namun saat ini dengan internet, memudahkan kaum perempuan untuk memulai usaha secara online yang dapat mengurangi biaya toko misalnya. Sehingga modal yang dibutuhkan dapat dikurangi.
2. Akses pasar. Bagi pengusaha perempuan yang terlibat dalam misi perdagangan, masih ada anggapan bahwa tidak mudah memperoleh dukungan dari pemerintah, sehingga harus bekerja sendiri dalam mendapatkan akses pasar.
3. Akses informasi. Pada masa sebelum internet berkembang, akses informasi sulit dilakukan. Namun saat ini, era internet terbuka lebar, berbagai informasi yang berkaitan dengan pasar, konsumen atau pemasok produk dapat dengan mudah dilakukan. Tetapi tentunya hal ini akan sulit bagi perempuan yang tidak memiliki akses terhadap teknologi tersebut.
4. Akses mengikuti pelatihan. Akses ini diantaranya adalah terhadap pelatihan yang dapat mengembangkan usaha namun masih agak sulit untuk mendapat pelatihan yang baik. Pelatihan yang dibutuhkan seperti kerajinan, ketrampilan berbisnis, mengelola keuangan, mengelola hubungan dengan orang lain dan sebagainya.

Sehubungan dengan itu agar aksesibilitas kaum perempuan terbuka luas dalam

mengembangkan usaha, perlu diadakan program pelatihan bagi kaum perempuan. Model pengembangan kapasitas melalui program pemberdayaan pelatihan female preneur. Beberapa tahapan yang dilakukan, sebagai berikut :

1. Perekrutan Relawan

Perekrutan relawan merupakan proses untuk mengajak pemuda pemudi dari Kabupaten Trenggalek agar terlibat dalam menyukseskan program female preneur secara sukarela.

Terdapat dua jenis relawan yang dibutuhkan, diantaranya :

- a. Koordinator, yakni Pemuda pemudi Trenggalek yang bersedia secara sukarela untuk memimpin (menjadi koordinator) guna mendukung proses perekrutan pelaksanaan pelatihan, hingga pendampingan peserta female preneur. Hanya dibutuhkan satu orang koordinator, sekaligus merangkap sebagai pendamping pada setiap pelatihan, yang diambil dari tokoh pemuda/pemudi yang sukses dalam ber wira usaha. Koordinator memiliki peran dan tanggung jawab bekerjasama dengan dinas terkait, instruktur maupun yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan female preneur.
- b. Pendamping, yakni pemuda pemudi Trenggalek yang bersedia secara sukarela untuk mendampingi peserta pelatihan. Peran dan tanggung jawab pendamping diantaranya, melakukan pendataan, promosi program, menghimpun peserta, mampu menjadi ruang informasi, melaksanakan kegiatan tatap muka serta terlibat aktif dalam kegiatan pelatihan mulai dari penyiapan perlengkapan pelatihan hingga mengkondisikan suasana pelatihan sesuai target yang ditetapkan.

2. Training of Trainer (ToT)

Merupakan proses transfer knowledge, penyamaan tujuan dan pembagian kerja yang difasilitasi oleh Tim Female Preneur Indonesia melalui kegiatan pertemuan selama dua hari.



Pelatihan dan pertemuan yang diperuntukkan stakeholders terkait di Kabupaten Trenggalek ini untuk menyiapkan support sytem demi kesuksesan program pelatihan female preneur.

Kegiatan ToT mutlak diadakan sebelum program dimulai, guna menyamakan pandangan bagi seluruh stakeholders sehingga mampu mewujudkan goal secara bersama. Selain itu ToT juga memberikan pembekalan kepada relawan agar memahami apa yang akan dipelajari oleh peserta, supaya dapat membantu mendampingi peserta dalam pelatihan dan pendampingan.

Dengan ToT diharapkan dapat mengundang beberapa stakeholders terkait, diantaranya Pemkab Trenggalek melalui OPD seperti unsur Setda, Bappeda, Perangkat Daerah terkait, relawan, dan sebagainya.

Adapun tujuan ToT adalah sebagai berikut ;

- a. Seluruh stakeholders yang terlibat memiliki kesamaan visi, tujuan dan program
- b. Semua Stakeholders memahami peran dan tanggungjawabnya
- c. Pembekalan wawasan kecakapan dan kesiapan relawan untuk melakukan tugas di lapangan
- d. Stakeholders yang terkait saling mengenal sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kegiatan dalam ToT diantaranya sebagai berikut :

- a. Diskusi menyamakan visi dan tujuan program
- b. Pembagian peran dan tanggung jawab
- c. Brainstorming untuk merumuskan skema teknis lapangan
- d. Simulasi tekhnis perekrutan peserrta
- e. Simulasi mengajar dengan kurikulum/pedoman.

Kegiatan ToT di fasilitasi oleh Female Preneur Indonesia, yang akan menjadi fasilitator, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Ceramah singkat (Lecture) , berupa pemberian landasan teoritis mengenai topik yang dibahas

- b. Permainan/simulasi (game/role playing), memberikan pengalaman mengenai aspek aspek psikologis tertentu melalui permainan berstruktur.
- c. Diskusi membahas suatu topik dengan partisipasi semua anggota kelompok
- d. Tugas mandiri, berupa pengisian quesioner yang akan memberi gambaran /profil yang dimiliki peserta.

3. Perekrutan Peserta

Adapun peserta yang akan menjadi penerima manfaat program adalah peserta terpilih yang akan lolos dalam proses seleksi. Diharapkan dalam satu kali pelatihan melibatkan kurang lebih 200 orang peserta yang memiliki semangat berwirausaha. Dengan kriteria peserta sebagai berikut :

- a. Pemuda-pemudi berusia 17-39 tahun
- b. Memiliki KTP Kabupaten Trenggalek
- c. Memiliki jenis kegiatan usaha apa saja
- d. Melek digital atau memiliki media sosial
- e. Bersedia mengikuti rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir
- f. Maksimal 20 % peserta diperbolehkan dari laki-laki, maupun usia lebih dari 40 tahun.

Tim seleksi terdiri dari relawan, Dinas terkait, dan Femalepreneur Indonesia yang berperan menentukan sasaran peserta yang terpilih.

4. Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan dengan cara tatap muka. Untuk mendukung proses belajar, peserta akan mendapatkan pedoman, berupa hard copy untuk memudahkan peserta dalam memahami materi. Peserta difasilitatori oleh Tim Femalepreneur Indonesia dengan kelas interaktif, dimana peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga dibekali dengan praktek secara langsung.

Harapan dari pelatihan ini agar peserta mampu memahami kewirausahaan, mampu merencanakan suatu usaha, menyusun strategi bisnis yang memiliki digital asset baik media sosial mapun marketplace dan selanjutnya mampu menjadi pengusaha



.....S
pemula di Kabupaten Trenggalek.

5. Monitoring dan Evaluasi

Mentoring atau disebut juga dengan pendampingan, adalah proses mendampingi peserta pelatihan female preneur yang telah mendapatkan pelatihan secara intensif. Adapun tujuan pendampingan ini adalah untuk membantu peserta pelatihan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan, serta mendampingi proses praktek mengerjakan lembar kerja yang telah disediakan dalam pelatihan.

Ada dua bentuk mentoring yang dilaksanakan, yaitu :

a. Mentoring Reguler

Yakni pendampingan secara online kepada seluruh peserta pelatihan yang telah dihimpun dalam grup Whatshapp. Kegiatan pelayanan mentoring ini dilakukan pada pukul 19.00 – 20.00 wib, setiap hari Senin s/d Jumat selama satu bulan melalui grup WA (Whatsapp) oleh Tim Mentor Femalepreneur Indonesia.

b. Coaching

Pendampingan kepada UMKM champion, yakni sepuluh peserta pelatihan, per setiap angkatan yang paling aktif dan bisnis potensial. Kegiatan pendampingannya dilaksanakan baik melalui online maupun tatap muka selama dua bulan, untuk membantu mereka dalam meningkatkan bisnisnya ke level berikutnya. Seperti memperbaiki branding, perluasan pasar, optimalisasi digital, hingga manajemen bisnis.

6. Laporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dalam pelaksanaan. Semua Level memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan, disamping stakeholders terkait dan lembaga pendamping, termasuk Tim Female Preneur Indonesia berkewajiban melaporkan hasil kegiatan secara berkala, baik bulanan, semester maupun tahunan, sesuai tingkatan.

Laporan pertanggungjawaban merupakan dokumen tertulis berisi penjelasan lengkap terkait pelaksanaan program Pelatiha Female Preneur, yang meliputi ;

a. Laporan pelaksanaan kegiatan, mencakup :

- Daftar hadir peserta dan mentor
- Dokumentasi pelaksanaan program, mulai dari perekrutan, pelatihan, dan pendampingan.

b. Laporan kurikulum dan pedoman bahan pembelajaran

c. Laporan hasil program

d. Laporan Penggunaan Dana

e. Laporan Perkembangan/ Usaha, yakni laporan yang harus dilampirkan oleh penerima manfaat, terkait dengan program yang memuat informasi tentang perubahan cara berpromosi dengan memanfaatkan asset, digital, jumlah tenaga kerja, perubahan jumlah kapasitas produksi, atau perubahan lain yang di dapatkan setelah menerima bantuan/pelatihan. Laporan ini meliputi :

- Laporan perkembangan usaha peserta, sebelum dan sesudah mengikuti program pelatihan
- Dokumen / foto usaha yang dijalani/dimiliki peserta.

PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

Sebagi upaya menjawab kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sesuai Visi Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju, melalui ekonomi inklusif, Sumber daya manusia kreatif dan pembangunan berkelanjutan, serta upaya mewujudkan misi memastikan UMKM naik kelas mendorong investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan wirausaha baru yang berorientasi pada langkah pengentasan kemiskinan dan ekonomi pesantren seperti tertuang dalam RPJMD,



maka Pemkab Trenggalek bekerjasama dengan PT Perempuan Hebat Indonesia, dalam hal ini Tim Femalepreneur Indonesia mengembangkan peningkatan kapasitas melalui pemberdayaan kaum perempuan melalui pelatihan Female Preneur agar masyarakat memiliki aksesibilitas khususnya bidang perekonomian.

Kegiatan ini dilaksanakan guna menumbuhkan pengusaha perempuan mandiri yang dapat mendorong perekonomian dalam keluarga. Kewirausahaan ini dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan intensif yang di desain secara khusus untuk memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan secara praktikal, ditambah dengan pendampingan dari mentor yang berpengalaman dengan harapan tumbuh dan berkembangnya perempuan hebat, perempuan unggul yang dapat mengelola sumber daya lokal, memiliki akses kemampuan wira usaha serta menjadi pengusaha yang mandiri.

Menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur tentunya tidak langsung dapat memperoleh hasil yang besar atau maksimal dalam waktu yang singkat. Dibutuhkan kesabaran dan keuletan serta kemauan untuk terus mencoba dan berhasil. Hal ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi kaum perempuan yang ingin mendalami usaha sebagai pengusaha perempuan. Pengusaha perempuan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari keluarga, swasta/masyarakat dan pemerintah. Dukungan itu bisa berbentuk pelatihan. Di masa mendatang pengusaha perempuan atau woman preneur akan semakin dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian dalam keluarga. Bukan hanya pria yang bisa menjadi pengusaha sukses, wanita pun sanggup menjadi mandiri dan sukses menjalankan perannya sebagai womanpreneur.

Saran

1. Mengingat pentingnya peran program pelatihan Female Preneur terhadap SDM

yang unggul bagi masyarakat dan masa depan bangsa, maka untuk mendukung pelatihan ini secara menyeluruh, agar setiap OPD untuk menganggarkan pada setiap tahun.

2. Pelatihan tidak hanya terbatas diikuti oleh bagi mereka yang memiliki usaha saja, tapi juga diperuntukkan bagi masyarakat umum, dan yang paling penting justru bagi mereka yang rentan terhadap kerawanan sosial. Walaupun memang memerlukan penyiapan anggaran yang lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ambar Teguh, Kemiskinan dan model model pemberdayaan, Yogyakarta : Gavia Media ; 2017
- [2] Dewi, Lita Rohma. 2018. Skripsi: Minsdset dan Perilaku Kewirausahaan Wanita Pengusaha Jasa Boga di Yogyakarta. Yogyakarta: UII Yogyakarta
- [3] Djojohadikusumo. Sumitro, Ekonomi Pembangunan di Indonesia, jakarta : Pt Pembangunan Jakarta ; 1955
- [4] Entrepreneur, Ciputra Way: Tidak Ada Kata Terlambat, 2013. <http://entrepreneur.bisnis.com/red/20130707/268/149079/ciputra-waytidak-ada-kata-terlambat>
- [5] Gandara, R. (2008). "Capacity Building Dosen pada Jurusan di Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara." Skripsi Sarjana pada Fakultas Ilmu Pendidikan UPI Bandung.
- [6] Haryono, Bambang Santoso, dkk. 2012. Capacity Building. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- [7] Hendro, Dasar dasar Kewirausahaan (Panduan bagi mahasiswa untuk mengenal, memahami dan memasuki dunia bisnis), Jakarta : Erlangga, 2011
- [8] Milen, A. Capacity Building meningkatkan kinerja sector public, Yogyakarta : pembaharuan, 2006



-S
- [9] Morrison, T. (2001). Actionable Learning: A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning. 528.
<https://id.bok.asia/book/2556961/6871ae>
- [10] M Sinaga Anggiat, Hadiati Sri, Pemberdayaan sumber daya manusia, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara, 2001
- [11] Ratnasari, Jenivia Dwi, Makmur Mochamad, Ribawanto Heru, (2013). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. Malang: Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, No.3
- [12] Siagian, Soundang P. Administrasi pembangunan, Jakarta : Gunung Agung, 1985
- [13] Soeprapto, H. R. Riyadi, (2006). Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. Disampaikan dalam Workshop Reformasi Birokrasi pada tanggal 30 Juni 2006 di Kendari
- [14] Soeprapto, H.R. Riyadi. 2003. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pembangunan Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- [15] Thébaud, Sarah . (2010). <http://faculty.chicagobooth.edu/workshops/orgs-markets/past/pdf/thebaud.pdf> diakses pada 10 Juni 2017
- [16] Winardi, J, Entrepreneur Dan Entrepreneurship, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- [17] Tim Female Preneur Indonesia, Buku Pedoman dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Bootcamp Perempuan Hebat Trenggalek Meroket : Trenggalek ; 2021
- [18] Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional
- [19] Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- [20] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- [21] UNDP. 1997. Program Pemerintahan yang di Desentralisasi: Memperkuat Kapasitas Pembangunan Masyarakat: Pengembangan Manajemen dan Divisi Pemerintahan, Biro untuk Kebijakan Pembangunan, September.
- [22] Badan Pusat Statistik ; 2021



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN